

Dr. Sisca Beatrix Kairupan, MSi.
Rebeca Mowilos, MAP.



ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK



Editor:

Margareth Inof Riisye Rantung, SH, MAP, MH

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

Dr. Sisca Beatrix Kairupan, MSi.
Rebeca Mowilos, MAP.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

Penulis:

Dr. Sisca Beatrix Kairupan, MSi.
Rebeca Mowilos, MAP.

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Margareth Inof Riisye Rantung, SH, MAP, MH

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vii, 113, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN : 978-623-147-908-2

Cetakan Pertama:

Juni 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2025 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ini yang berjudul **“Analisis Kebijakan Publik”** dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai kontribusi akademik untuk memperkuat pemahaman mengenai konsep, teori, dan praktik kebijakan publik, khususnya bagi kalangan mahasiswa, dosen, peneliti, dan praktisi di bidang administrasi publik dan ilmu sosial-politik lainnya.

Secara substansi, buku ini memuat uraian yang komprehensif mengenai pengertian dasar kebijakan publik, ruang lingkup serta karakteristiknya dalam konteks negara dan masyarakat. Di dalamnya dibahas pula berbagai pendekatan teori kebijakan publik — mulai dari pendekatan institusional, rasional, inkremental, kelompok, hingga pendekatan sistem dan elit — sebagai fondasi konseptual untuk memahami dinamika pembuatan kebijakan.

Tidak hanya terbatas pada tataran konseptual, buku ini juga menggambarkan secara rinci tahapan-tahapan dalam proses kebijakan publik, meliputi: formulasi masalah, perumusan alternatif kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, serta evaluasi kebijakan. Penulis menyajikan masing-masing tahapan tersebut dengan dukungan ilustrasi praktis, contoh-contoh kebijakan di Indonesia, serta ulasan kritis yang merefleksikan tantangan dan realitas birokrasi yang dihadapi saat ini.

Salah satu kekuatan buku ini adalah penekanan pada pentingnya partisipasi publik, nilai-nilai demokrasi, dan akuntabilitas dalam proses kebijakan publik. Di samping itu, dibahas pula aspek lingkungan strategis, peran aktor kebijakan, serta urgensi kolaborasi antar-lembaga dalam menjawab isu-isu kompleks masyarakat.

Harapannya, buku ini tidak hanya menjadi bacaan wajib dalam mata kuliah Kebijakan Publik, tetapi juga menjadi rujukan penting dalam penelitian, penulisan tugas akhir, dan pengambilan keputusan strategis di lingkungan pemerintahan dan organisasi publik. Penulis juga berharap buku ini dapat membuka ruang dialog akademik yang lebih luas mengenai arah dan kualitas kebijakan publik di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki berbagai kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi pengembangan ilmu administrasi publik dan mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan yang lebih responsif, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENGANTAR ANALISIS KEBIJAKAN	1
1.1 Definisi Analisis Kebijakan Publik	1
1.2 Konsep Dasar Analisis Kebijakan Publik	2
1.3 Pentingnya Analisis Kebijakan Publik	4
BAB II TEORI DAN MODEL ANALISIS KEBIJAKAN	6
2.1 Konsep Dasar Analisis Kebijakan Publik	6
2.2 Pentingnya Analisis Kebijakan Publik	8
2.3 Model Inkremental (Incremental Model)	9
2.4 Model Multiple Streams (Kingdon).....	11
2.5 Model Advocacy Coalition Framework (ACF)	12
2.6 Model Institusional	14
2.7 Model Pilihan Publik (Public Choice Model).....	15
2.8 Sintesis dan Aplikasi Model Kebijakan.....	16
BAB III PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK.....	18
3.1 Model Siklus Kebijakan (Policy Cycle)	18
3.2 Agenda Setting: Memasukkan Isu ke Dalam Agenda Pemerintah	20
3.3 Formulasi Kebijakan: Merancang Solusi Kebijakan	22
3.4 Implementasi Kebijakan: Dari Teori ke Praktik	25
3.5 Evaluasi Kebijakan: Mengukur Dampak dan Kinerja	29
3.6 Terminasi dan Pembelajaran Kebijakan	33
BAB IV ANALISIS STAKEHOLDER DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK	38
4.1 Pendahuluan.....	38
4.2 Definisi Stakeholder	38
4.3 Kategori Stakeholder dalam Kebijakan Publik.....	39
4.4 Peran Stakeholder dalam Pembuatan Kebijakan Publik.....	41
4.5 Kepentingan Stakeholder dalam Kebijakan Publik	44
4.6 Teknik Analisis Stakeholder dalam Kebijakan Publik	45
4.7 Tantangan dalam Mengelola Stakeholder	47
4.8 Studi Kasus: Kebijakan Larangan Kantong Plastik	48

BAB V METODE ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK	55
5.1 Analisis Biaya-Manfaat (Cost-Benefit Analysis)	55
5.2 Analisis Dampak Lingkungan (Environmental Impact Assessment - EIA).....	56
5.3 Analisis Biaya-Efektivitas (Cost-Effectiveness Analysis - CEA)	58
5.4 Analisis Stakeholder	60
5.5 Analisis Multi-Kriteria (Multi-Criteria Analysis - MCA)	61
BAB VI EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK	64
6.1 Konsep Dasar Evaluasi Kebijakan Publik	64
6.2 Tahapan Melaksanakan Evaluasi Kebijakan	73
6.3 Tantangan dalam Evaluasi Kebijakan	75
6.4 Hambatan Umum dalam Evaluasi Kebijakan.....	76
6.5 Strategi Mengatasi Tantangan Evaluasi.....	77
BAB VII IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK	78
7.1 Konsep Dasar Implementasi Kebijakan.....	78
7.2 Faktor-Faktor Penentu Implementasi Kebijakan	79
7.3 Model Implementasi Kebijakan.....	81
7.4 Strategi Implementasi Efektif.....	84
7.5 Studi Kasus Implementasi Kebijakan	86
7.6 Tantangan Implementasi di Indonesia	87
BAB VIII KEBIJAKAN PUBLIK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	89
8.1 Definisi Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik.....	89
8.2 Mengapa Partisipasi Masyarakat Penting?	90
8.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat Menurut Arnstein (1969)	92
8.4 Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik.....	95
8.5 Tantangan Partisipasi Masyarakat di Indonesia.....	100
8.6 Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	109

BAB I

PENGANTAR ANALISIS

KEBIJAKAN

1.1 DEFINISI ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

1.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah tindakan strategis yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam masyarakat. Kebijakan ini berbentuk regulasi, program, atau keputusan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks kepentingan publik.

Pendapat para ahli:

- **Thomas R. Dye (2017)** menyatakan bahwa:
"Public policy is whatever governments choose to do or not to do."
Artinya, kebijakan publik tidak hanya mencakup tindakan yang dilakukan, tetapi juga keputusan untuk tidak bertindak.
- **James E. Anderson (2014)** mendefinisikan kebijakan publik sebagai:
"A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern."
Ini menekankan bahwa kebijakan publik bersifat tujuan-spesifik dan dirancang untuk mengatasi isu publik tertentu.

1.1.2 Apa Itu Analisis Kebijakan Publik?

Analisis kebijakan publik adalah kegiatan ilmiah dan sistematis untuk menilai kebijakan yang ada maupun yang akan dirancang. Tujuannya adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih alternatif kebijakan terbaik.

Langkah-langkah umum dalam analisis kebijakan:

BAB II

TEORI DAN MODEL

ANALISIS KEBIJAKAN

2.1 KONSEP DASAR ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

2.1.1 Tahapan Kebijakan Publik (Policy Cycle)

Policy cycle adalah kerangka kerja sistematis untuk memahami proses pembuatan kebijakan publik. Model ini menggambarkan kebijakan sebagai siklus yang terdiri dari beberapa tahap berurutan.

Tahapan dalam siklus kebijakan (Howlett, Ramesh & Perl, 2020):

- 1. Agenda Setting (Penetapan Agenda):**

Menentukan isu-isu penting yang layak dibahas dalam agenda pemerintah.

“Isu hanya menjadi kebijakan publik ketika berhasil masuk ke dalam agenda resmi pembuat keputusan.” – Howlett et al.

- 2. Formulasi Kebijakan:**

Merancang berbagai alternatif solusi berdasarkan kajian ilmiah, nilai, dan kepentingan politik.

- 3. Adopsi Kebijakan:**

Memilih salah satu alternatif untuk dijadikan kebijakan resmi melalui mekanisme legislatif atau eksekutif.

- 4. Implementasi:**

Proses pelaksanaan kebijakan oleh instansi terkait, seperti kementerian atau dinas teknis.

Implementasi bukan hanya soal melaksanakan perintah, tetapi bagaimana aktor birokrasi dan sumber daya diarahkan untuk mencapai tujuan kebijakan.

BAB III

PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK

Proses kebijakan publik adalah rangkaian langkah atau tahapan yang ditempuh oleh pemerintah atau lembaga publik dalam merumuskan dan mengimplementasikan solusi atas permasalahan publik. Proses ini **tidak bersifat linier** melainkan **sirkuler dan dinamis**, karena setiap tahap bisa saling memengaruhi dan bahkan terjadi pengulangan atau penyesuaian berdasarkan evaluasi dan perubahan kondisi.

Menurut **James E. Anderson (2014)**, proses kebijakan publik bukanlah suatu rangkaian langkah yang kaku, tetapi **siklus yang fleksibel**, tempat berbagai aktor saling berinteraksi, bernegosiasi, dan memengaruhi arah kebijakan.

3.1 MODEL SIKLUS KEBIJAKAN (POLICY CYCLE)

Model ini biasanya terdiri dari **enam tahapan utama**, sebagai berikut:

1. **Identifikasi Masalah (Problem Identification)**
Mengenali isu publik yang memerlukan perhatian dan intervensi pemerintah.
2. **Perumusan Kebijakan (Policy Formulation)**
Merancang alternatif kebijakan, melakukan analisis kebijakan, dan menyusun proposal.
3. **Adopsi Kebijakan (Policy Adoption)**
Pengambilan keputusan formal oleh lembaga legislatif, eksekutif, atau badan pengambil keputusan lainnya.

BAB IV

ANALISIS STAKEHOLDER DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK

4.1 PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik, baik itu sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam proses pembuatannya, kebijakan tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai aktor atau pihak yang disebut **stakeholder**.

Mengapa penting?

Stakeholder memiliki peran dalam membentuk agenda, mendesain kebijakan, dan bahkan menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi. Oleh karena itu, **analisis stakeholder** menjadi alat penting untuk:

- Mengidentifikasi siapa saja yang terlibat,
- Memetakan tingkat kepentingan dan pengaruh mereka,
- Mengelola keterlibatan stakeholder agar proses kebijakan lebih partisipatif dan efektif.

4.2 DEFINISI STAKEHOLDER

1. Definisi Umum:

- **Freeman (1984)** mendefinisikan stakeholder sebagai:
“Any group or individual who can affect or is affected by the achievement of the organization’s objectives.”

BAB V

METODE ANALISIS

KEBIJAKAN PUBLIK

5.1 ANALISIS BIAYA-MANFAAT (COST-BENEFIT ANALYSIS)

Pengertian:

Cost-Benefit Analysis (CBA) adalah metode kuantitatif yang digunakan untuk menilai efisiensi ekonomi dari suatu kebijakan atau proyek dengan membandingkan total manfaat yang diperoleh dengan total biaya yang dikeluarkan, semuanya dinyatakan dalam nilai uang. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal.

Tahapan Pelaksanaan:

1. **Identifikasi semua biaya dan manfaat:** Menyusun daftar lengkap semua komponen biaya dan manfaat baik langsung maupun tidak langsung.
2. **Kuantifikasi dalam nilai uang:** Mengonversi semua komponen tersebut ke dalam nilai moneter, termasuk manfaat sosial.
3. **Penyesuaian nilai waktu (diskonto):** Menggunakan faktor diskonto untuk memperhitungkan nilai waktu uang (time value of money).
4. **Perhitungan utama:**
 - **Net Present Value (NPV):** Selisih antara nilai sekarang dari manfaat dan biaya.
 - **Benefit-Cost Ratio (BCR):** Rasio antara nilai sekarang dari manfaat dan biaya.

BAB VI

EVALUASI KEBIJAKAN

PUBLIK

6.1 KONSEP DASAR EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

6.1.1 Definisi Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah proses sistematis dan terstruktur yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis informasi mengenai pelaksanaan serta hasil dari suatu kebijakan atau program publik. Evaluasi ini mencakup tiga aspek utama: **implementasi**, **dampak**, dan **pencapaian tujuan kebijakan**. Tujuannya bukan hanya untuk menilai apakah kebijakan telah berhasil atau gagal, tetapi juga untuk memberikan wawasan mendalam yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses dan hasil kebijakan di masa depan.

Menurut **Patton (1997)**, evaluasi kebijakan adalah upaya sistematis untuk menilai nilai atau manfaat dari suatu intervensi kebijakan dalam konteks tujuannya. Sementara itu, **Rossi, Lipsey & Freeman (2004)** menegaskan bahwa evaluasi bukan sekadar pengumpulan data, tetapi sebuah proses ilmiah yang memiliki tujuan normatif dan praktis—yaitu memperbaiki efektivitas kebijakan dan mendorong akuntabilitas publik.

Evaluasi kebijakan tidak selalu menunggu program berakhir. Evaluasi dapat dilakukan sepanjang siklus kebijakan berlangsung—baik sebelum kebijakan diimplementasikan (*ex-ante*), saat kebijakan dijalankan (*on-going*), maupun setelah selesai (*ex-post*). Hal ini memungkinkan pembuat kebijakan untuk mengidentifikasi hambatan atau ketidakefisienan lebih awal, serta membuat penyesuaian yang dibutuhkan secara tepat waktu.

BAB VII

IMPLEMENTASI

KEBIJAKAN PUBLIK

7.1 KONSEP DASAR IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

7.1.1 Definisi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses di mana keputusan kebijakan diubah menjadi tindakan nyata dalam bentuk program, proyek, atau kegiatan yang dijalankan oleh lembaga-lembaga pelaksana. Tahapan ini menjadi jembatan antara perumusan kebijakan dan hasil (outcome) yang diharapkan. Implementasi menuntut adanya tindakan operasional di lapangan yang sejalan dengan tujuan kebijakan. Tanpa implementasi yang efektif, kebijakan yang baik di atas kertas pun tidak akan memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

Implementasi tidak hanya soal pelaksanaan teknis, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana aktor-aktor pelaksana memahami, menginterpretasikan, dan menjalankan kebijakan dalam konteks sosial, politik, dan budaya tertentu. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi tidak lepas dari interaksi antara struktur kebijakan, aktor pelaksana, serta lingkungan eksternal yang memengaruhi prosesnya.

7.1.2 Pendekatan dalam Studi Implementasi

Dalam studi implementasi kebijakan, terdapat tiga pendekatan utama yang banyak digunakan untuk memahami proses dan tantangan implementasi.

BAB VIII

KEBIJAKAN PUBLIK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

8.1 DEFINISI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik adalah sebuah proses yang memungkinkan warga negara untuk terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pembuatan kebijakan, mulai dari tahap perumusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan. Keterlibatan ini tidak hanya sebatas memberikan suara atau opini, tetapi juga melibatkan warga dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta adil dan berkeadilan bagi semua lapisan sosial.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti konsultasi publik, forum diskusi, survei, atau keterlibatan langsung dalam kelompok perencanaan kebijakan. Model partisipasi ini dapat bervariasi, dari konsultasi satu arah hingga keterlibatan penuh dalam proses pengambilan keputusan, tergantung pada konteks dan kebutuhan kebijakan tersebut. Dengan keterlibatan ini, masyarakat diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih luas, memperkenalkan tantangan lokal yang mungkin terlewatkan oleh pemerintah pusat, serta memastikan bahwa

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. E. (2014). *Public Policymaking: An Introduction*. Cengage Learning.
- Bardach, E. (2019). *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*. CQ Press.
- Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2019). *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving*. CQ Press.
- Baumgartner, F. R., & Jones, B. D. (1993). *Agendas and Instability in American Politics*. University of Chicago Press.
- Boardman, A. E., Greenberg, D. H., Vining, A. R., & Weimer, D. L. (2018). *Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice*. Cambridge University Press.
- Bryson, J. M. (2004). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement*. Jossey-Bass.
- Bryson, J. M. (2004). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations*. Jossey-Bass.
- Buchanan, J. M., & Tullock, G. (1962). *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy*. University of Michigan Press.
- Brugha, R., & Varvasovszky, Z. (2000). *Stakeholder Analysis: A Review*. Health Policy and Planning.
- Campbell, D. T. (1975). *Assessing the Impact of Planned Social Change*. Public Affairs Center.
- Dye, T. R. (2005). *Understanding Public Policy*. Pearson.
- DeLeon, P. (1983). *Policy Termination as a Political Process*. Policy Sciences.
- Dodgson, J., Spackman, M., Pearman, A., & Phillips, L. (2009). *Multi-Criteria Analysis: A Manual*. Department for Communities and Local Government.

- Drummond, M. F., Sculpher, M. J., Claxton, K., Stoddart, G. L., & Torrance, G. W. (2015). *Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes*. Oxford University Press.
- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. Routledge.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy*. Pearson.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy*. Pearson.
- Eden, C., & Ackermann, F. (1998). *Making Strategy: The Journey of Strategic Management*. SAGE Publications.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman.
- Glasson, J., Therivel, R., & Chadwick, A. (2012). *Introduction to Environmental Impact Assessment*. Routledge.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Howlett, M. (2019). *Designing Public Policies: Principles and Instruments*. Routledge.
- Hill, M., & Hupe, P. (2002). *Implementing Public Policy: Governance in Theory and Practice*. SAGE Publications.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford University Press.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford University Press.
- Jenkins, W. I. (1978). *Policy Analysis: A Political and Organizational Perspective*. Martin Robertson.
- John, P. (2012). *Analyzing Public Policy*. Routledge.
- Keeney, R. L., & Raiffa, H. (1993). *Decisions with Multiple Objectives: Preferences and Value Tradeoffs*. Cambridge University Press.
- Kingdon, J. W. (1995). *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. HarperCollins.
- Kingdon, J. W. (2014). *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. Pearson.
- Lasswell, H. D. (1956). *The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis*. University of Maryland Press.

- Luhmann, N. (2000). *The Reality of the Mass Media*. Stanford University Press.
- Lawrence, D. P. (2003). *Environmental Impact Assessment: Practical Solutions to Recurrent Problems*. Wiley.
- Levin, H. M., & McEwan, P. J. (2001). *Cost-Effectiveness Analysis: Methods and Applications*. SAGE Publications.
- Lindblom, C. E. (1959). *The Science of "Muddling Through"*. Public Administration Review.
- Lipsky, M. (1980). *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*. Russell Sage Foundation.
- Matland, R. E. (1995). *Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation*. Journal of Public Administration Research and Theory.
- Mishan, E. J., & Quah, E. (2007). *Cost-Benefit Analysis*. Routledge.
- Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). *Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts*. Academy of Management Review.
- Nas, T. F. (1996). *Cost-Benefit Analysis: Theory and Application*. SAGE Publications.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Patton, M. Q. (1997). *Utilization-Focused Evaluation: The New Century Text*. SAGE Publications.
- Peters, B. G. (2019). *Institutional Theory in Political Science: The New Institutionalism*. Edward Elgar Publishing.
- Peters, B. G. (2020). *Advanced Introduction to Public Policy*. Edward Elgar Publishing.
- Petts, J. (1999). *Handbook of Environmental Impact Assessment*. Blackwell Science.
- Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1984). *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*. University of California Press.

- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., ... & Stringer, L. C. (2009). *Who's in and Why? A Typology of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resource Management*. Journal of Environmental Management.
- Robinson, L. A., Hammitt, J. K., & O'Keeffe, L. (2019). *Valuing Mortality Risk Reductions in Global Benefit-Cost Analysis*. Journal of Benefit-Cost Analysis.
- Rose, R. (2004). *Learning from Comparative Public Policy: A Practical Guide*. Routledge.
- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). *Evaluation: A Systematic Approach*. SAGE Publications.
- Sabatier, P. A. (1999). *Theories of the Policy Process*. Westview Press.
- Sabatier, P. A., & Jenkins-Smith, H. C. (1993). *Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach*. Westview Press.
- Sabatier, P. A., & Weible, C. M. (2014). *Theories of the Policy Process*. Westview Press.
- Simon, H. A. (1947). *Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organizations*. Macmillan.
- Stake, R. E. (2004). *Standards-Based and Responsive Evaluation*. SAGE Publications.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Administration & Society.
- Vedung, E. (1997). *Public Policy and Program Evaluation*. Transaction Publishers.
- Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2017). *Policy Analysis: Concepts and Practice*. Routledge.
- Weiss, C. H. (1998). *Evaluation: Methods for Studying Programs and Policies*. Prentice Hall.
- Whittington, D. (2001). *Cost-Benefit Analysis for Developing Countries*. Edward Elgar Publishing.
- Wildavsky, A. (1979). *The Politics of the Budgetary Process*. Little, Brown.
- Patton, M. Q. (1997). *Utilization-Focused Evaluation*. SAGE Publications.

- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2004). *Evaluation: A Systematic Approach*. SAGE Publications.
- Sabatier, P. A. (2007). *Theories of the Policy Process*. Westview Press.
- Weiss, C. H. (1998). *Evaluation: Methods for Studying Programs and Policies*. Prentice Hall.
- Whittington, D. (2001). *Cost-Benefit Analysis for Developing Countries*. Edward Elgar Publishing.
- Wildavsky, A. (1979). *The Politics of the Budgetary Process*. Little, Brown.



Buku ini menyajikan kajian mendalam mengenai proses kebijakan publik dalam konteks tata kelola pemerintahan modern. Dimulai dari definisi dasar hingga pendekatan dan model analisis kebijakan, buku ini menyuguhkan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana suatu isu dapat diangkat menjadi kebijakan, bagaimana kebijakan diformulasikan, diimplementasikan, dan dievaluasi secara sistematis.

Penulis membagi isi buku ke dalam beberapa bab strategis: mulai dari konsep dan teori kebijakan publik, siklus kebijakan (*policy cycle*), hingga metode dan pendekatan analisis kebijakan seperti pendekatan rasional, inkremental, partisipatif, hingga model-model kontemporer seperti *Multiple Streams*, *Advocacy Coalition Framework*, dan *Public Choice Theory*. Buku ini juga membahas pentingnya stakeholder dan proses partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan, serta memberikan studi kasus aktual seperti implementasi BPJS, kebijakan larangan kantong plastik, dan program JKN-KIS.

Pendekatan praktis ditunjukkan dalam pembahasan evaluasi kebijakan yang dilengkapi dengan alat dan metode seperti *Cost-Benefit Analysis*, *Evaluasi Dampak*, dan *Metode Kualitatif* seperti studi kasus dan FGD. Buku ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif, dilengkapi dengan referensi mutakhir dan studi lapangan yang relevan dengan konteks kebijakan di Indonesia.



IKAPI

CV. Tahta Media Group

Surakarta, Jawa Tengah

Web : www.tahtamedia.com

Ig : [tahtamedia](https://www.instagram.com/tahtamedia)

Telp/WA : +62 896-5427-3996

